

Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Wali Kota Medan Periode 2020 – 2024

Ronaldo Supratman Silaban¹ Putri Apriani Harahap² Anna Maudina Manurung³ Julia Ivanna⁴

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia¹²³⁴

Email: ronaldosilaban223344@gmail.com¹ putriapriani872@gmail.com²
mrgaannaa@gmail.com³ juliaivanna@unimed.ac.id⁴

Abstract

Public welfare is the goal of a country. The birth of regional autonomy gives regional governments the right and authority to manage their own regions with the aim of improving the welfare of the people. Regional Autonomy is the right, authority and obligation of autonomous regions to regulate and manage their own Government Affairs and the interests of local communities within the system of the Unitary State of the Republic of Indonesia. This research uses qualitative research with a case study approach. With the implementation of regional autonomy, the perception of the people of Medan City towards the performance of the Mayor of Medan has given rise to pros and cons. This can be seen from the effects felt by the community in accordance with the policies made by the Medan City government.

Keywords: Community perception, Medan Mayor's performance, Regional autonomy

Abstrak

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan suatu negara. Dengan lahirnya otonomi daerah memberikan hak dan wewenang pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dengan penerapan otonomi daerah, persepsi masyarakat Kota Medan terhadap kinerja Wali Kota Medan menimbulkan pro dan kontra hal ini dapat dilihat dari efek yang dirasakan masyarakat sesuai dengan kebijakan yang dibuat pemerintah Kota Medan.

Kata Kunci: Persepsi masyarakat, Kinerja Wali Kota Medan, Otonomi daerah



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Berlakunya otonomi daerah memberikan peluang dan ruang yang sangat besar untuk pemerintah daerah dalam membangun dan memajukan daerahnya masing-masing. Sesuai dengan UU NO 23 tahun 2014 menjelaskan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan penjelasan tersebut dapat disimpulkan pemerintah daerah diberikan hak sepenuhnya oleh pemerintah pusat untuk mengelola daerahnya sendiri dan harus bertanggung jawab terhadap daerahnya masing-masing. Hal tersebut didukung oleh menurut Escobar-Lemmon Otonomi Daerah adalah sebagai bentuk pemindahan otoritas, fungsi dan tanggung-jawab dalam mereformulasi kebijakan dan keputusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan konsep demikian maka terdapat kewenangan suatu daerah untuk membuat program dan peraturan sesuai dengan kebutuhan daerahnya (Pardosi, 2023). Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Tahun 1945.

Otonomi daerah bertujuan supaya daerah bisa meningkatkan tuntutan rakyat agar bisa mengembangkan daerahnya di tengah proses demokratisasi yang sangat pesat saat ini. Dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat berbagai macam pembagian dan unsur penyelenggaraan otonomi, serta setiap daerah otonom wajib menjalankan fungsi dan prinsip otonomi daerah agar penyelenggaraan dapat berorientasi kepada tujuan yang sebenarnya yaitu kesejahteraan masyarakat. (Lintang Prabowo and M Tenku Rafli, 2022). Dalam penelitian ini kepala daerah yang di maksud adalah pemerintah WaliKota. Kepala Daerah merupakan figur atau manajer yang menentukan efektivitas pencapaian tujuan organisasi pemerintah daerah. Keberhasilan dari pembangunan nasional juga ditentukan dari keberhasilan sebuah daerah, sehingga jika kinerja dari Pemerintah Daerah buruk akan berdampak pada pemerintahan Nasional, yaitu rendah atau berkurangnya kinerja efektivitas penyelenggaraan Nasional (Sulaiman, Sihombing and Larasati, 2020). Dengan demikian, Kepala Daerah dan perangkat daerah harus saling bekerjasama untuk mencapai tujuan daerah. Dalam kasus ini pembangunan merupakan kinerja utama yang dilakukan Walikota Medan terutama dibidang infrastruktur jalan, banyak titik-titik di Kota Medan yang sudah mendapatkan pembangunan jalan. Kinerja Walikota dalam hal ini membawa dampak yang baik pada masyarakat. Disamping kelebihan kinerja terdapat kekurangan yang diakibatkan program kerja tidak secara maksimal dilaksanakan. Menurut visi misi yang disampaikan semasa kampanye kepada masyarakat dengan bebas masyarakat dapat mengeluarkan pendapat memuat kritikan terhadap kinerja Walikota Medan yang menjadi fokus penelitian ini menghasilkan persepsi-persepsi masyarakat terhadap capaian kinerja berdasarkan visi misi Walikota Medan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tertentu. Fenomena ini dapat berupa sesuatu hal yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya yang secara holistik dideskripsikan dalam bentuk kata-kata yang menggambarkan kondisi apa adanya (Wahyuni *et al.*, 2010). Studi kasus menurut Yin dalam (Morissan, 2019) adalah suatu penyelidikan empiris yang menggunakan berbagai sumber bukti untuk meneliti suatu fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata yang sebenarnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan data yang di peroleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data yang di gunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau tanpa perantara (Abdussamad, 2021). Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Murdiyanto, 2020).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Besarnya kewenangan yang dimiliki oleh daerah Kota pada era otonomi daerah ini, memberikan konsekuensi yang signifikan bagi pemerintah daerah Kota. Konsekuensi tersebut berupa keharusan untuk meningkatkan kinerja dari aparatur pemerintahan guna terpenuhinya berbagai kebutuhan daerah (Soares, 2015). Tuntutan terhadap peningkatan kualitas kerja dari aparatur pemerintah daerah Kota, khususnya eksekutif, menjadikan Walikota dan Wakil Walikota beserta aparatur pemerintahan agar mampu mengelola

beberapa hal yang berkaitan dengan organisasi perangkat pemerintahan, sumber daya alam dan sumber daya manusia serta potensi-potensi lainnya yang dimiliki oleh daerah kota tersebut. Sebagai pimpinan dan penanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya Walikota bertanggungjawab kepada DPRD.

Visi Dan Misi Program Bobby Nasution Dan Aulia Rahman

Sesuai dengan visi dan misi dari program kerja Bobby Nasution dan Aulia Rahman sebagai Wali Kota Medan periode 2019-2024 yaitu sebagai berikut:

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah, Maju, dan kondusif.

Misi:

1. Medan membangun: Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas SDM.
2. Medan Kondusif: Mewujudkan kenyamanan dan iklim kondusif bagi segenap masyarakat kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat.
3. Medan Inovatif: Mewujudkan kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif yang berbasis pada penguatan hukum capital, teknologi digital dan sosial budaya.
4. Medan Beridentitas: Mewujudkan kota Medan yang beradab, santun, harmonis, toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air.

Kinerja Wali Kota Medan Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat

Dari visi dan misi Bobby Nasution dan Aulia Rahman (Wali Kota Medan) banyak ragam opini masyarakat yang menyampaikan beberapa program telah dijalankan dalam masa kepemimpinannya Bobby Nasution. Sesuai dengan Sumber dari Dinas Kominfo Kota Medan menjelaskan hal ini juga dapat dilihat dari banyaknya pembangunan yang dilakukan oleh pasangan Bobby Nasution dan Aulia Rahman di wilayah kota Medan. Wali Kota Medan pada periode ini konsisten menepati janji-janji yang disampaikannya saat kampanye. Kerap dia menyampaikan janji kampanyenya dulu telah menjadi janji Pemko Medan. Seluruh perangkat daerah berkewajiban bersama dirinya untuk menepati janji tersebut. Dengan mengembangkan jaringan kolaborasi, perencanaan matang disertai target yang jelas. Secara bertahap orang nomor satu di Pemko Medan ini menepati janji-janji kampanyenya. Menjadikan Medan bagian Utara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan, Ibu Kota Sumatera Utara ini adalah salah satu janji yang telah direalisasikannya. Di antaranya adalah membangun Jembatan Titi Dua di Kelurahan Belawan Sicanang, Medan Belawan. Lama sudah warga mendambakan jembatan yang menghubungkan dua kelurahan tersebut.

Selain itu, Kota Medan juga sangat kerap dengan kata banjir. Untuk memenuhi janji ini dalam penanganan banjir, yaitu dengan pembangunan kolam retensi khususnya di Kecamatan Medan Johor. Keberadaan kolam retensi ini diharapkan dapat mengatasi dan meminimalisir permasalahan banjir yang kerap terjadi di Kecamatan Medan Johor. Pembangunan kolam retensi ini rencananya akan dilakukan di Tahun 2023 oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan dengan luas tanah lebih kurang mencapai 7 hektar. Dalam meningkatkan infrastruktur jalan, Pemko Medan dibawah kepemimpinan Wali Kota Medan Bobby Nasution berkomitmen terus memperbaiki infrastruktur khususnya jalan dan drainase. Dari panjang jalan yang ada di Kota Medan sekitar 3.000 KM, ditargetkan akan terus dilakukan perbaikan sesuai dengan perencanaan sampai jalan dalam kondisi baik.

Wujudkan Medan kondusif salah satu upaya Bobby Nasution jaga kestabilan ekonomi. Mewujudkan Kota Medan yang kondusif menjadi salah satu visi Wali Kota Medan Bobby Nasution dalam kepemimpinannya. Selain demi memberikan keamanan dan kenyamanan

kepada masyarakat, hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menjaga ketertarikan bagi para investor yang ingin berinvestasi di ibukota Provinsi Sumatera Utara. Untuk memberantas segala bentuk tindak kejahatan, terutama di kawasan paling utara Kota Medan yakni Kecamatan Medan Belawan. Sebab, sebagai kawasan ekonomi di Kota Medan, Bobby Nasution ingin agar kawasan Medan Belawan senantiasa aman dan kondusif. Orang nomor satu di Pemko Medan ini tidak ingin kondisi yang tidak aman dan kondusif menyebabkan investor yang sudah ada malah lari, begitu juga dengan yang ingin berinvestasi justru tidak jadi. Padahal kehadiran investor sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan kota terbesar ketiga di Indonesia ini.

Selain pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi dan keamanan, Bobby Nasution juga ajak semua wujudkan medan sebagai kota toleran. Wujud kerukunan dapat diimplementasikan dan diterapkan dalam tiga hal yakni kerukunan antar pribadi/sesama, kerukunan antar umat beragama dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Jika ketiga hal ini dapat diwujudkan, maka kerukunan di Kota Medan dapat terjaga dan ibukota Provinsi Sumatera Utara dapat menjadi cerminan kota toleran.

Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Wali Kota Medan

Sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan beberapa masyarakat kota medan, terdapat pro dan kontrak sesuai dengan pandangan masing masing narasumber. Menurut Slameto persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke otak manusia melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera penglihatan, pendengaran, peraba, perasa dan pencium (Sulaiman, Sihombing and Larasati, 2020). Berbagai pandangan masyarakat terhadap kinerja Wali Kota Medan juga di latar belakang oleh profesi masing-masing masyarakat. Salah satunya adalah masyarakat yang berprofesi supir terutama supir angkot sangat mengeluhkan terhadap program Wali Kota Medan terkait pelebaran drainase atau parit jalan hal ini menyebabkan jalan menjadi sempit dan macet. Salah satu supir mengatakan bahwa program Wali Kota Medan sangat bagus namun, seharusnya tempat pembangunan di lakukan secara bergantian atau tidak serentak supaya tidak menimbulkan kemacetan yang cukup lama.

Pelaksanaan pembangunan di Kota Medan banyak pandangan masyarakat yang menganggap kurang sesuai yaitu salah satunya adanya proyek yang gagal yaitu lampu pocong. Dari pembangunan jalan menurut masyarakat, kurang menjaga keamanan karena bahan yang di gunakan tidak sesuai sehingga mengakibatkan beberapa kendaraan jatuh karena jalan licin. Dari segi keamanan sesuai dengan pendapat masyarakat kota medan berpendapat bahwa keamanan kota medan saat ini sudah lebih baik sebelumnya salah satunya dari begal. Masyarakat kota medan mengapresiasi kinerja Wali Kota Medan dalam memberikan keamanan di daerah Kota Medan. Dari beberapa penjelasan di atas dapat di lihat bahwa ada beberapa plus minus kinerja Wali Kota Medan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menjadi permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan otonomi daerah dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat (Fauzi, 2019).

Jika dilihat dari semangat Undang-Undang Otonomi Daerah tersebut maka tujuan Otonomi Daerah digariskan sebagai berikut. 1) Memercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memerhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan ciri khas suatu daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2)

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memerhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, dan antardaerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara (Thahir, 2019).

KESIMPULAN

Indonesia merupakan suatu kesatuan yang memiliki daerah yang sangat luas. Untuk menjamin kesejahteraan masyarakat Indonesia di setiap daerah maka ditetapkan undang-undang otonomi daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka untuk itu setiap pemerintah daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk mengurus daerahnya sendiri. Tujuan dari otonomi daerah ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia salah satunya adalah masyarakat Kota Medan. Dari segi penerapan otonomi daerah ada plus minus nya terhadap masyarakat. Dalam hal ini dapat dilihat pengaruh penerapan otonomi daerah sangat besar kepada masyarakat, baik dari segi infrastruktur, penanggulangan masalah dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, H.Z. (2021) *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. syakir Media Press.
- Fauzi, A. (2019) 'Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik', *Spektrum Hukum*, 16(1), p. 119
- Lintang Prabowo and M Tenku Rafli (2022) 'Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Rakyat Indonesia', *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), pp. 20–28.
- Morissan (2019) *Riset Kualitatif*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Murdiyanto, E. (2020) *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal)*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN 'Veteran' Yogyakarta press. Yogyakarta.
- Pardosi, R.O.A.G. (2023) 'Sinergitas Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah Dalam Perumusan Kebijakan', *Jurnal Legislasi Indonesia*, volume 20(no 2), p. hlm 70
- Soares, S. (2015) "Pembagian Tugas dan Wewenang Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kota Yogyakarta Disusun, 151, pp. 10–17.
- Sulaiman, S., Sihombing, G.K. and Larasati, A.F. (2020) 'Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas pada Masa Kepemimpinan Atbah Romi Suhaili Tahun 2016-2020', *Eksos*, 16(2), pp. 110–117
- Thahir, B. (2019) 'Kebijakan Sosial Dan Otonomi Daerah', *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, pp. 1–12.
- Wahyuni, F.R.F.M.W.S.J.L.H.S. et al. (2010) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin.